



IMPLEMENTASI MAKAN BERGIZI GRATIS

TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

.....

Senin, 04 November 2024





8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT KEPEMIMPINAN PRABOWO-GIBRAN



Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.



Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menutaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.



Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.



Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi



Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.



Menaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.



Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, Gen Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).



Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan **meningkatkan rasio penerimaan negara** terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

PENERAPAN MAKAN BERGIZI GRATIS DENGAN PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA



Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

merupakan Program 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024

1. Memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan;
2. Nilai total anggaran yg disediakan **APBN 2025 sebesar Rp71 Triliun.**



KONDISI SAAT INI 70%

anak-anak Indonesia tidak sarapan pagi pergi ke sekolah



ANGKA STUNTING DI INDONESIA SEBESAR 21,06%
URUTAN KE-27 DARI 154 NEGARA YANG MEMILIKI DATA STUNTING

rata-rata tinggi badan orang Indonesia 157,98 cm (Laki-laki 163,55 cm dan Perempuan 152,79 cm), rata-rata IQ penduduk Indonesia 78,49 (dibawah Singapura dengan rata-rata 105,89 dan Jepang rata-rata 106,48), **umumnya anak-anak di Indonesia mendapat gizi yang kurang lengkap.**



Penerapan Makan Bergizi Gratis

(dikelola oleh BGN secara sentralistik dan didukung Kementerian/Lembaga Negara/Pemda dan Pihak Ketiga)



1 Unit Pelayanan Dapur



2.500-3.000
SISWA



50 ORANG
TENAGA KERJA

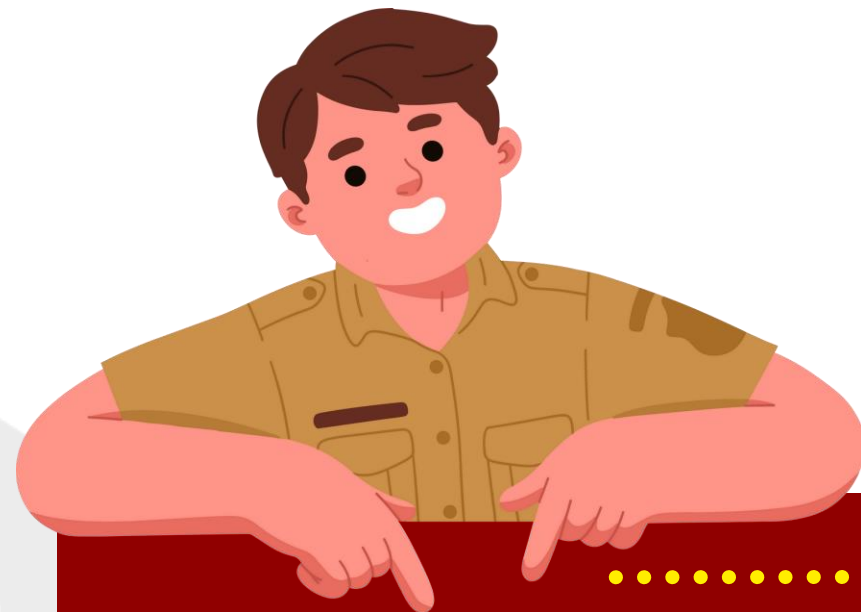
Unit Pelayanan (dapur) harus sesuai dengan yang ditetapkan **Badan Gizi Nasional** (Luas bangunan 20 M x 20 M, Luas Tanah 2 kali Luas Bangunan, Akses bahan baku berbeda dengan akses makan siap dikirim, pembagian ruangan mempertimbangkan aspek higienis dan sanitasi, memiliki akses listrik dan air bersih yang layak, **target pencapaian program 2025 adalah 5.000 Unit/Satuan Pelayanan untuk 15 Juta-25 Juta orang** penerima manfaat;

BADAN GIZI NASIONAL

Membangun



1.542 Unit Pelayanan dan sisanya 3.548 Unit/Satuan Pelayanan yg diharapkan dari Kerjasama/Kontrak Sewa dengan BUMN/Pemda/Pihak Ketiga).



Untuk mendapatkan produksi dan distribusi bahan baku (beras, sayur, daging, susu, dll) dan kesiapan bahan makanan bergizi melalui BUMDES dan Koperasi serta melibatkan Posyandu, kader PKK, Pukesmas unit pelayanan untuk balita dan ibu hamil, sedangkan untuk sekolah pendistribusian makanan sampai ke siswa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

TANTANGAN, KENDALA, PERMASALAHAN

MAKAN BERGIZI GRATIS

Standar Satuan Harga dalam APBN untuk 1 paket makanan Rp15.000,00 namun di wilayah Provinsi Kaltara (Kab. Malinao, Nunukan dan Tarakan) berkisar Rp20.000,00-Rp25.000,00 sehingga tidak sesuai dengan standar yang digunakan dalam APBN tersebut;

Kemungkinan terjadinya kelangkaan bahan baku untuk MBG;

Terjadi kenaikan harga sebagai akibat kelangkaan bahan baku karena tingginya permintaan (terjadi inflasi).

Adanya keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah membiayai dukungan Program MBG di daerah terutama Kabupaten/Kota



STRATEGI EKOSISTEM SATUAN PELAYANAN





MODEL PENGELOLAAN SATUAN PELAYANAN

	MODEL 1	MODEL 2	MODEL 3
Pembangunan Satpel	BGN	Kerjasama Lembaga Negara	PIHAK KETIGA
Pemilik Lahan	BGN	Instansi Pemerintah	PIHAK KETIGA
Pengoperasian Satpel	BGN	BGN	BGN
Supervisi	BGN	BGN	BGN
Status Kepegawaian	ASN DAN PPPK BADAN GIZI NASIONAL	1.Kepala unit, pengawasan pangan, Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan & Administrasi berasal dari BGN dengan Status PPPK 2.Pelaksana Teknis berasal dari komunitas/pemerintah daerah/koperasi	1.Kepala unit, pengawasan pangan, Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan & Administrasi berasal dari BGN dengan Status PPPK 2.Pelaksana Teknis berasal dari komunitas/pemerintah daerah/koperasi
Status Aset Tanah Bangunan Up	Sepenuhnya Milik BGN	Milik Lembaga Negara/Pemerintah Daerah	Milik Pihak Ketiga
Status Legal Operasional	Dalam pengelolaan satker BGN	Kontrak Sewa Unit Pelayanan dengan Lembaga Negara/Pemerintah Daerah per Tahun	Kontrak Sewa Unit Pelayanan dengan Pihak Ketiga per Tahun
Jenis Pengelola	BGN	BGN Bersama Mitra	BGN Bersama Mitra



SIMULASI PERHITUNGAN KEBUTUHAN ANGGARAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



REKAPITULASI KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH BERSUMBER DARI APBD BERBASIS PAD

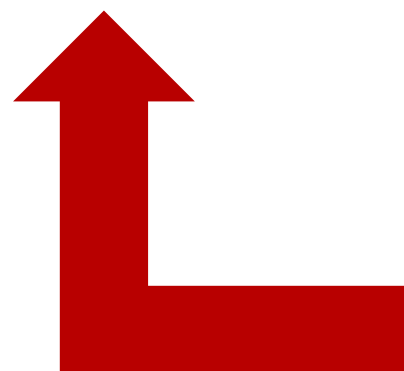


APBN

TOTAL APBN
Rp71 Triliun



TOTAL APBN + APBD
Rp71 Triliun + Rp23,77 Triliun
= Rp94,77 Triliun



Besaran Kemampuan
Kontribusi APBD
Rp23,77 Triliun

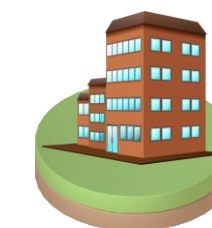


APBD



APBD

Besaran Anggaran Kontribusi
Provinsi (39,02%)
Rp9,27 Triliun



Provinsi

Besaran Anggaran Kontribusi
Kabupaten (37,26%)
Rp8,86 Triliun



Kabupaten

Besaran Anggaran Kontribusi
Kota (23,72%)
Rp5,64 Triliun



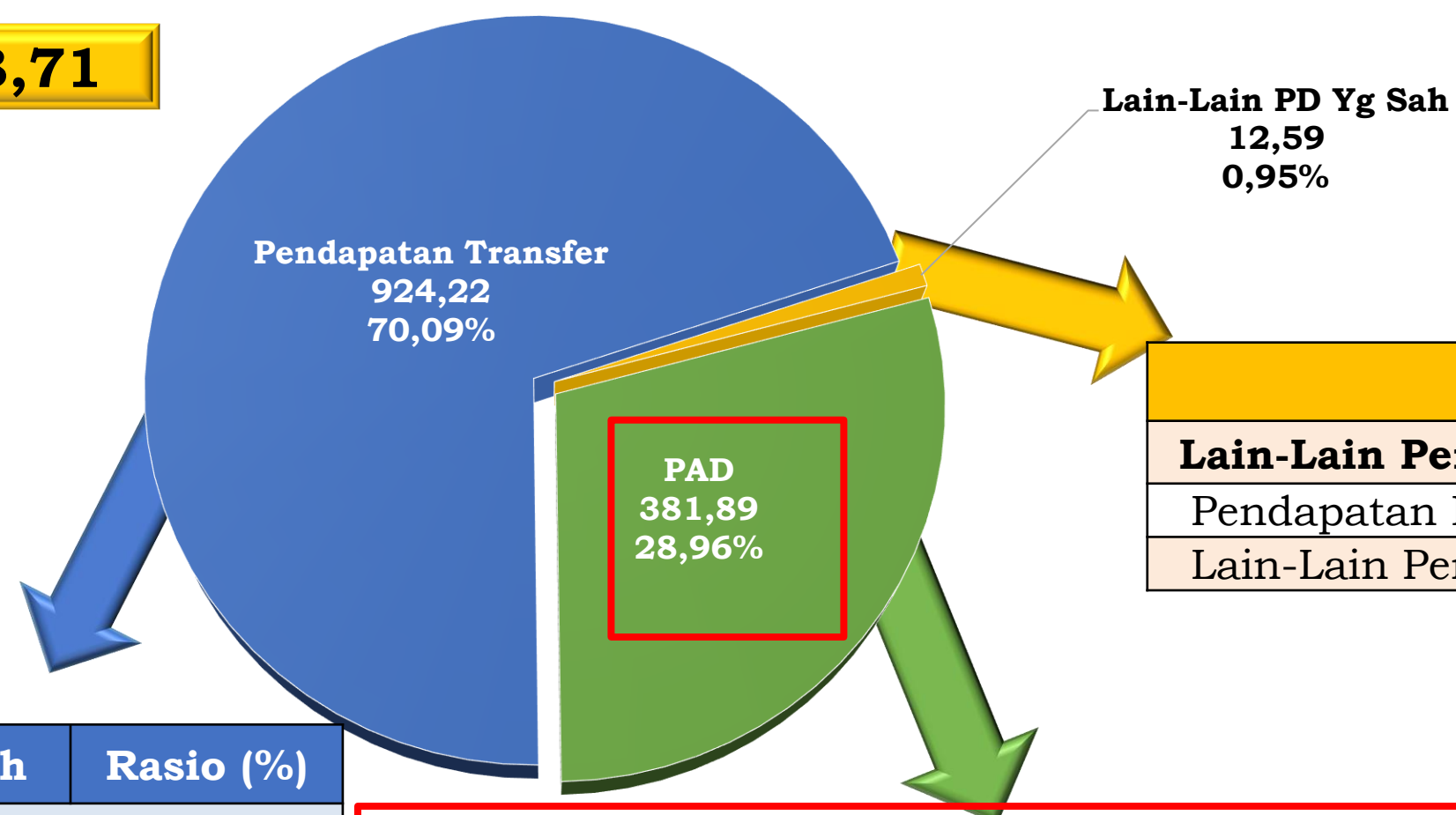
Kota



APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TA 2024

triliun rupiah

Pendapatan Daerah : 1.318,71



	Jumlah	Rasio (%)
Pendapatan Transfer		
Pemerintah Pusat	859,02	65,14%
Antar Daerah	65,21	4,94%

	Jumlah	Rasio (%)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Pendapatan Hibah	6,57	0,50%
Lain-Lain Pendapatan	6,02	0,46%

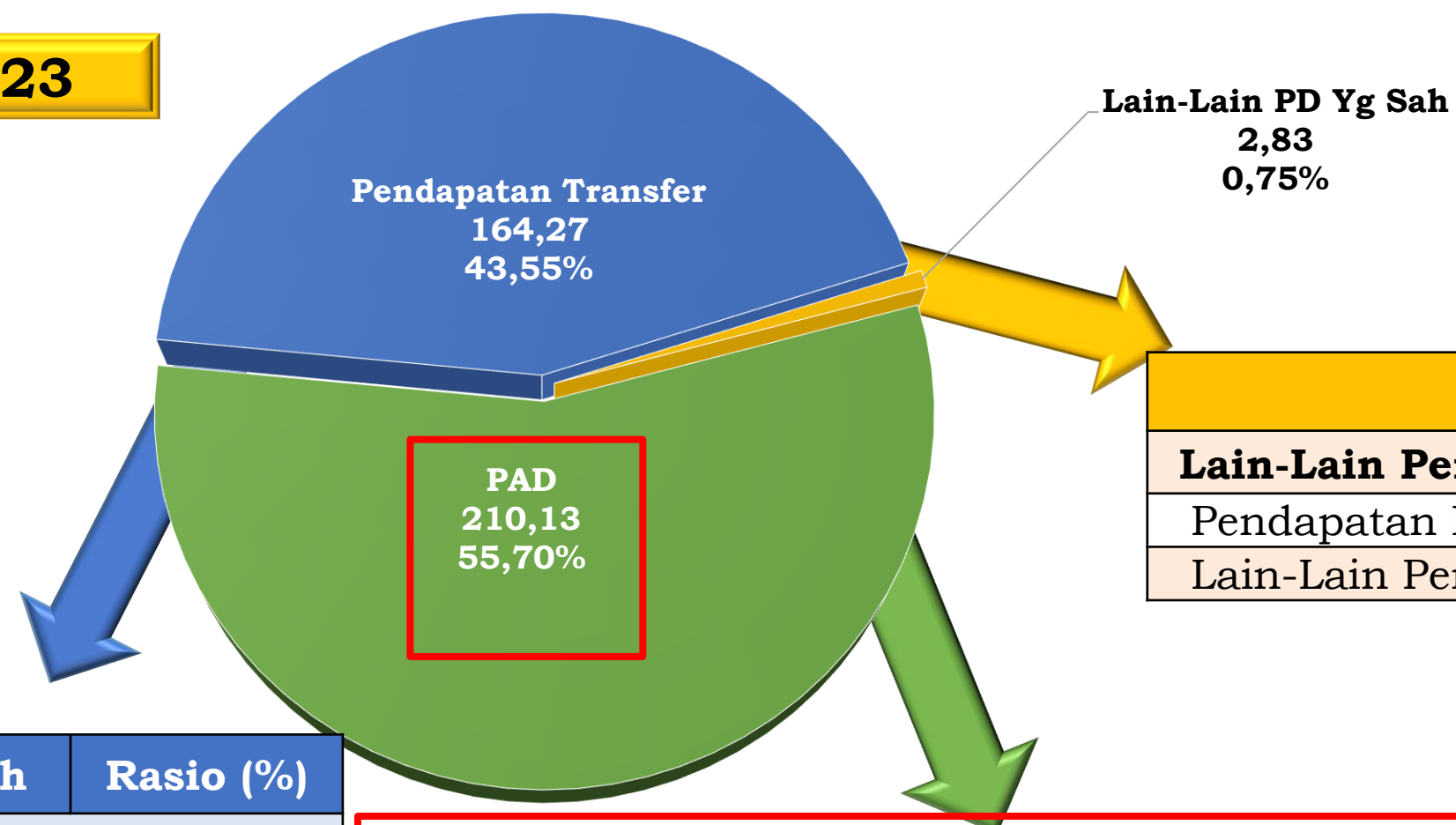
	Jumlah	Rasio (%)
Pendapatan Asli Daerah		
Pajak Daerah	276,78	20,99%
Retribusi Daerah	33,52	2,54%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	13,10	0,99%
Lain-Lain PAD Yang Sah	58,50	4,44%



APBD PROVINSI TA 2024

triliun rupiah

Pendapatan Daerah : 377,23



	Jumlah	Rasio (%)
Pendapatan Transfer		
Pemerintah Pusat	163,80	43,42%
Antar Daerah	0,47	0,13%

	Jumlah	Rasio (%)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Pendapatan Hibah	2,18	0,58%
Lain-Lain Pendapatan	0,65	0,17%

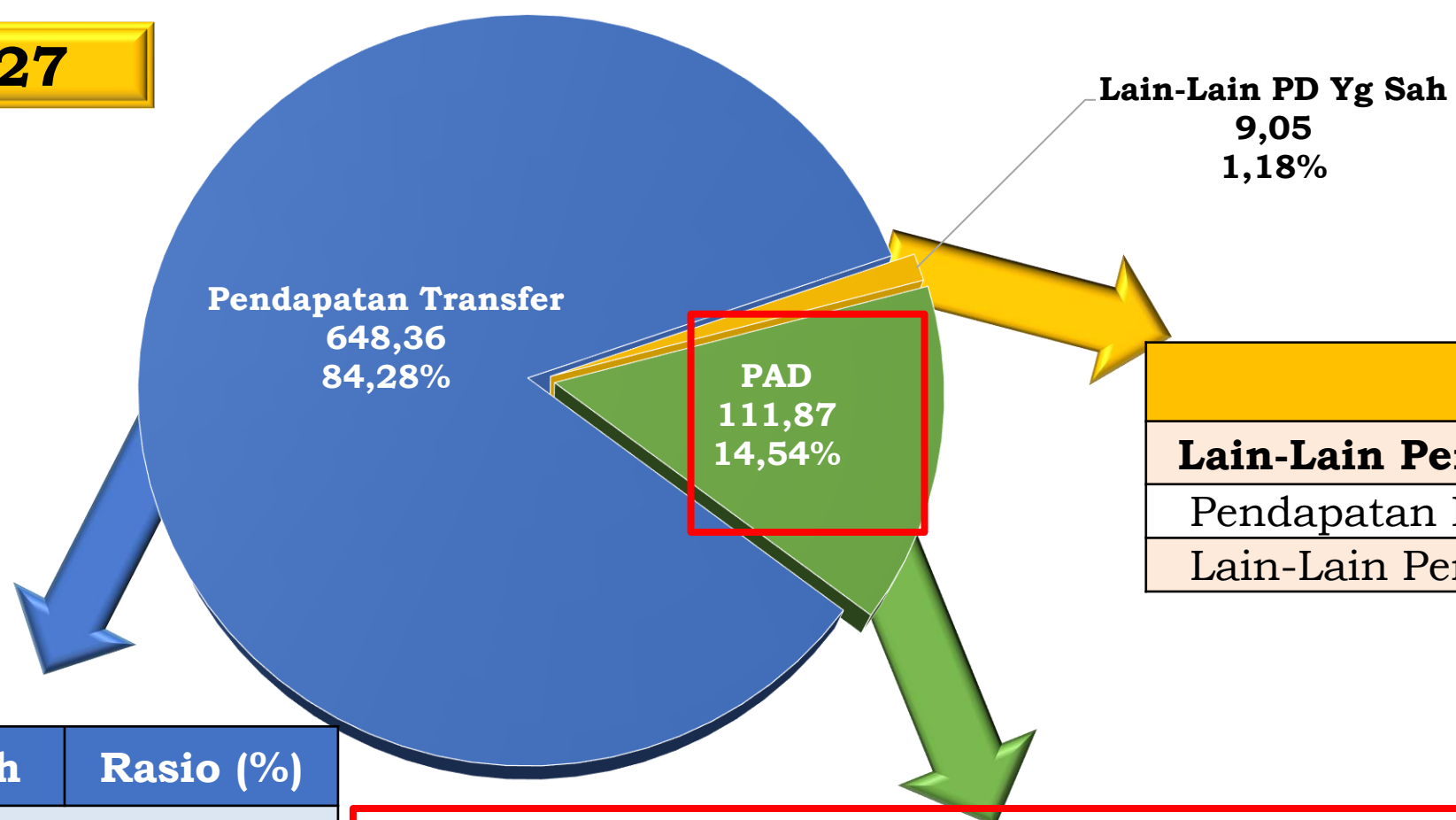
	Jumlah	Rasio (%)
Pendapatan Asli Daerah		
Pajak Daerah	179,44	47,57%
Retribusi Daerah	7,09	1,88%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6,68	1,77%
Lain-Lain PAD Yang Sah	16,92	4,48%



APBD KABUPATEN TA 2024

triliun rupiah

Pendapatan Daerah : 769,27



	Jumlah	Rasio (%)
Pendapatan Transfer		
Pemerintah Pusat	601,64	78,21%
Antar Daerah	46,72	6,07%

	Jumlah	Rasio (%)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Pendapatan Hibah	4,35	0,57%
Lain-Lain Pendapatan	4,69	0,61%

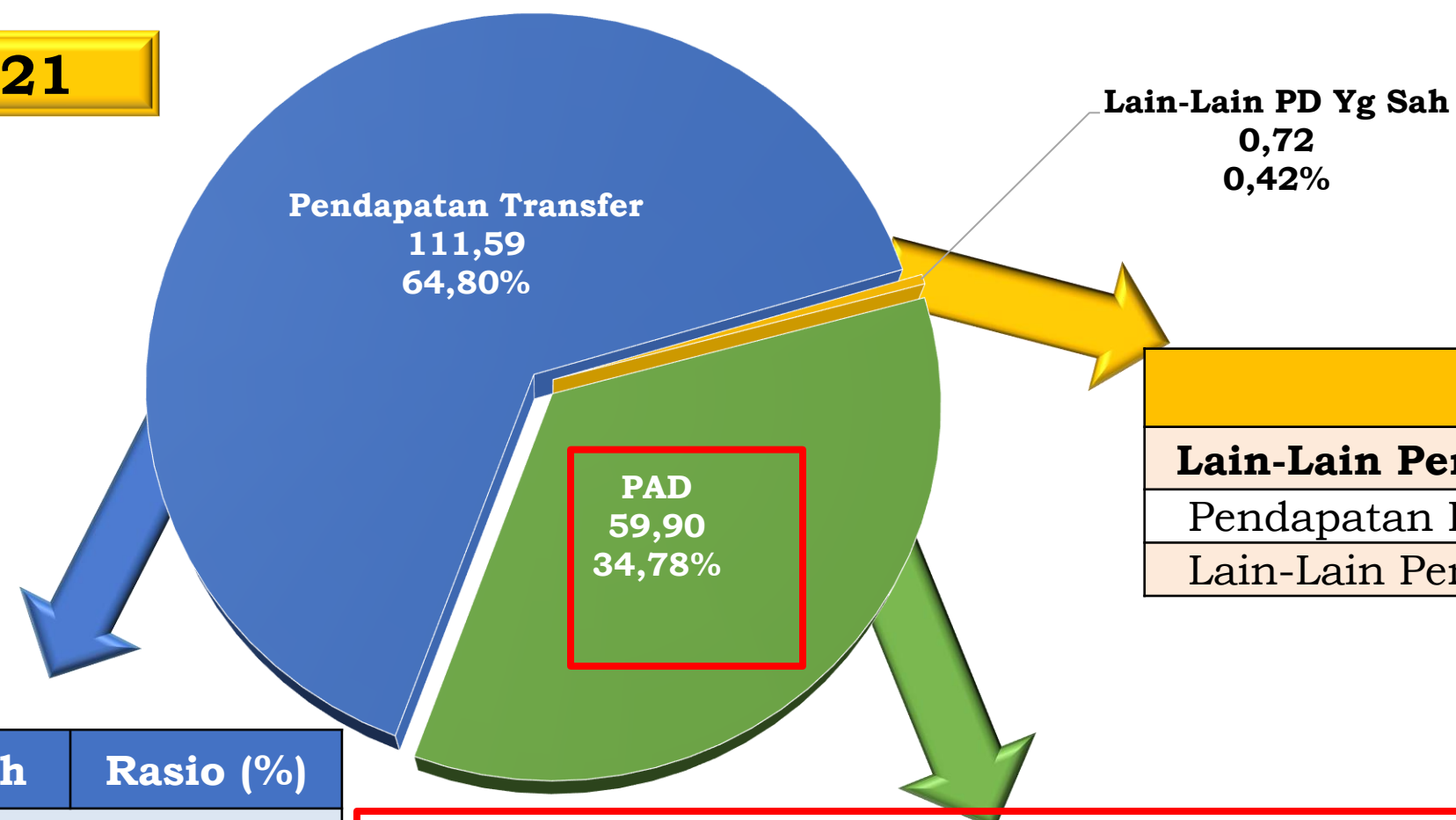
	Jumlah	Rasio (%)
Pendapatan Asli Daerah		
Pajak Daerah	55,16	7,17%
Retribusi Daerah	18,06	2,35%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4,90	0,64%
Lain-Lain PAD Yang Sah	33,75	4,39%



APBD KOTA TA 2024

triliun rupiah

Pendapatan Daerah : 172,21



	Jumlah	Rasio (%)
Pendapatan Transfer		
Pemerintah Pusat	93,57	54,34%
Antar Daerah	18,02	10,46%

	Jumlah	Rasio (%)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Pendapatan Hibah	0,05	0,03%
Lain-Lain Pendapatan	0,67	0,39%

	Jumlah	Rasio (%)
Pendapatan Asli Daerah		
Pajak Daerah	42,18	24,49%
Retribusi Daerah	8,36	4,85%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	1,53	0,89%
Lain-Lain PAD Yang Sah	7,84	4,55%



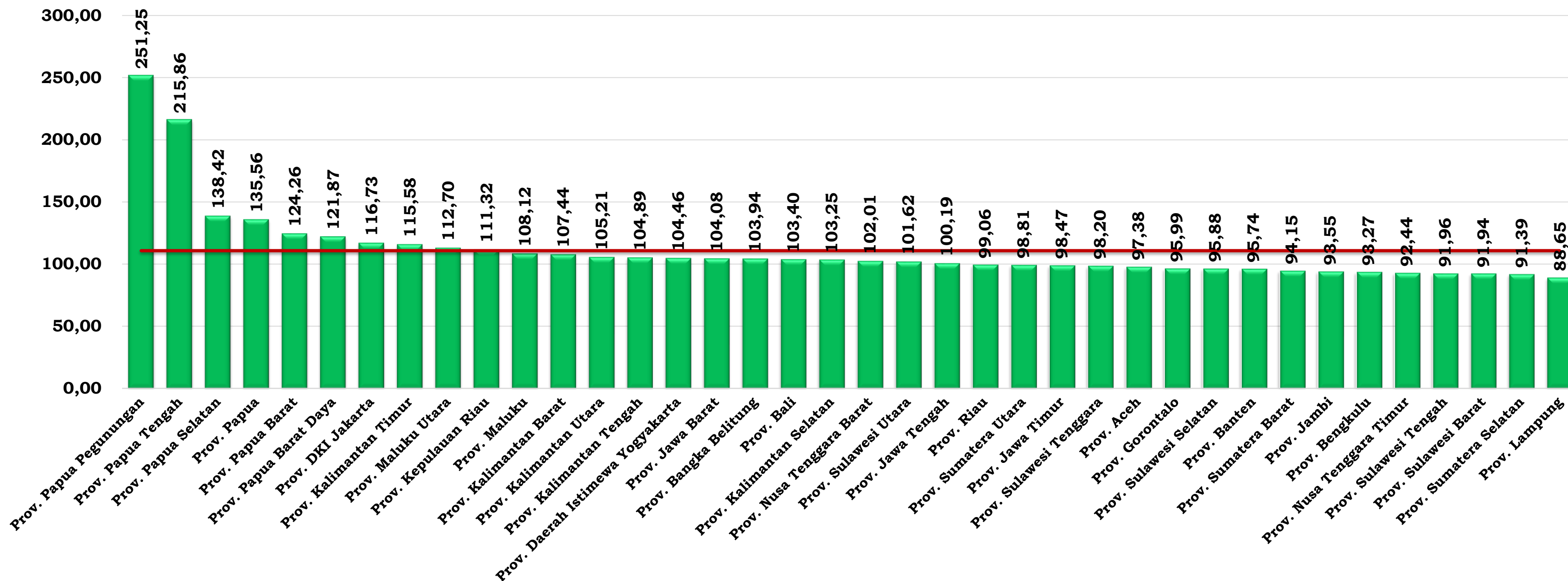
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



PROVINSI

Rata-Rata = 110,76



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

RATA-RATA PROVINSI



kemendagri.go.id

Kemendagri_RI

Kemendagri

Kemendagri

Sumber Data: 546 Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024.



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

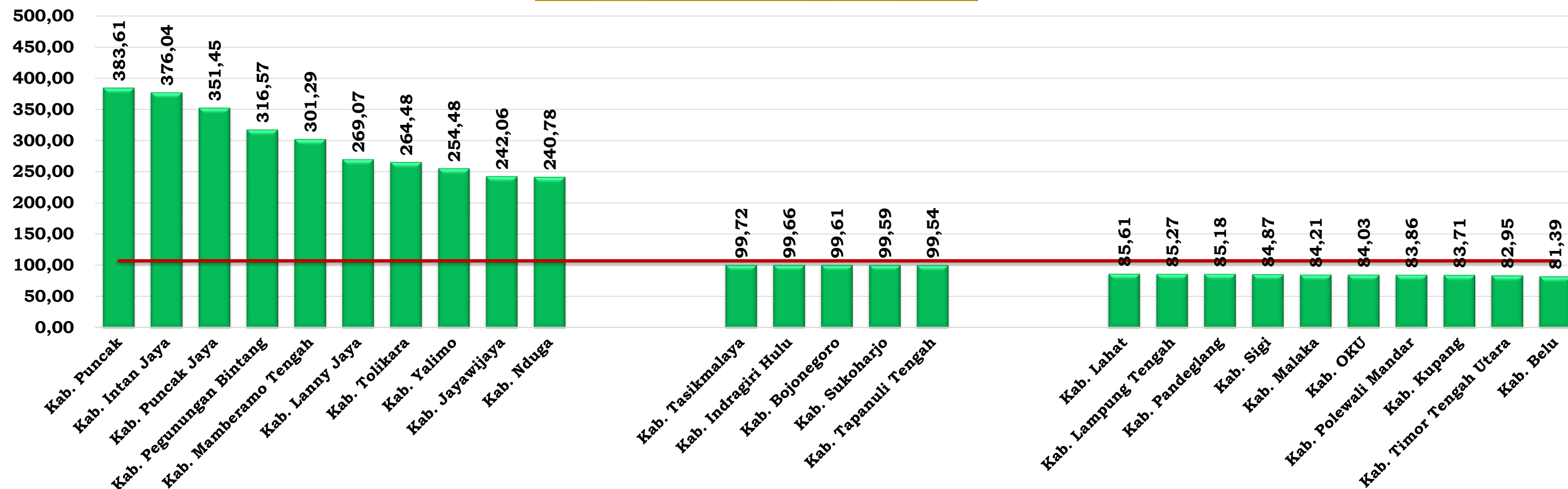
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



miliar rupiah

KABUPATEN

Rata-Rata = 106,88



10 KABUPATEN TERBESAR
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

10 KABUPATEN TERKECIL
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

RATA-RATA KABUPATEN



kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



Kemendagri



Kemendagri

Sumber Data: 546 Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024.



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

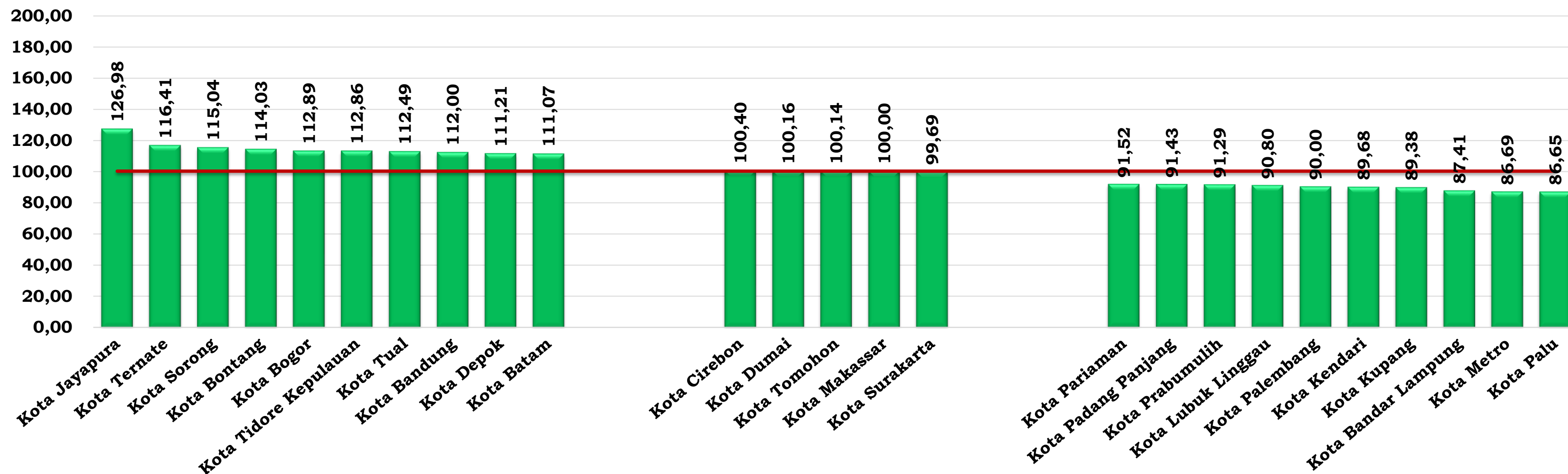
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



miliar rupiah

KOTA

Rata-Rata = 100,34



10 KOTA TERBESAR
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

10 KOTA TERKECIL
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

RATA-RATA KOTA



kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



Kemendagri



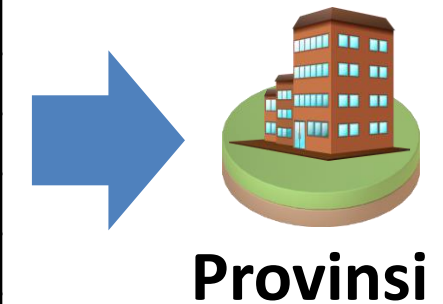
Kemendagri

Sumber Data: 546 Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024.

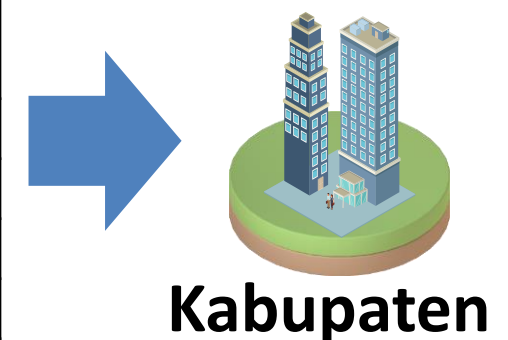


RINGKASAN TOTAL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA YANG BERSUMBER DARI APBD BERBASIS PAD

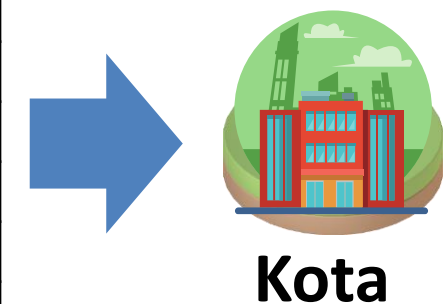
KATEGORI PROVINSI	Jumlah Pemda	Persentase Kontribusi	Dukungan APBD	Persentase
Sangat Rendah	5	1,00%	Rp15.387.225.363	0,06%
Rendah	6	1,75%	Rp110.619.578.046	0,47%
Sedang	11	2,50%	Rp542.180.945.477	2,28%
Tinggi	9	3,25%	Rp1.386.586.574.039	5,83%
Sangat Tinggi	7	4,00%	Rp7.219.531.154.158	30,37%
Total	38	-	Rp9.274.305.477.083	39,02%



KATEGORI KABUPATEN	Jumlah Pemda	Persentase Kontribusi	Dukungan APBD	Persentase
Sangat Rendah	316	6,50%	Rp2.520.528.627.849	10,60%
Rendah	87	7,75%	Rp3.317.864.821.731	13,96%
Sedang	8	9,00%	Rp1.175.779.008.365	4,95%
Tinggi	2	10,25%	Rp702.923.651.172	2,96%
Sangat Tinggi	2	11,00%	Rp1.139.122.594.410	4,79%
Total	415	-	Rp8.856.218.703.527	37,26%



KATEGORI KOTA	Jumlah Pemda	Persentase Kontribusi	Dukungan APBD	Persentase
Sangat Rendah	20	6,50%	Rp119.845.812.797	0,50%
Rendah	45	7,75%	Rp969.955.098.328	4,08%
Sedang	15	9,00%	Rp1.033.457.822.913	4,35%
Tinggi	12	10,25%	Rp3.166.938.510.375	13,32%
Sangat Tinggi	1	11,00%	Rp347.784.674.361	1,46%
Total	93	-	Rp5.637.981.918.773	23,72%





RASIO DUKUNGAN APBD BERBASIS PAD

PERSENTASE PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH		
RENTANG AWAL	RENTANG AKHIR	KATEGORI
0	15%	Sangat Rendah
16%	30%	Rendah
31%	45%	Sedang
46%	60%	Tinggi
61%	100%	Sangat Tinggi

KATEGORI	% Kontribusi		Pemerintah Daerah		
	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Kabupaten	Kota
Sangat Rendah	1,00%	6,50%	5	316	20
Rendah	1,75%	7,75%	6	87	45
Sedang	2,50%	9,00%	11	8	15
Tinggi	3,25%	10,25%	9	2	12
Sangat Tinggi	4,00%	11,00%	7	2	1
Total			38	415	93

Rekapitulasi Kontribusi Pemerintah Daerah

TOTAL PROVINSI se INDONESIA	Rp9.274.305.477.083	39,02%
TOTAL KABUPATEN se INDONESIA	Rp8.856.218.703.527	37,26%
TOTAL KOTA se INDONESIA	Rp5.637.981.918.773	23,72%
TOTAL PROVINSI + KAB/KOTA se INDONESIA	Rp23.768.506.099.383	100,00%



Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri



PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif




STRUKTUR APBD

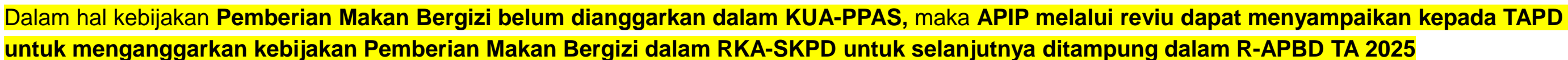
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Pajak Daerah;• Retribusi Daerah;• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.			BELANJA DAERAH	Belanja Operasi	<ul style="list-style-type: none">• Pegawai• Barang dan Jasa• Bunga• Subsidi• Hibah• Bansos
	Pendapatan Transfer	Transfer Pemerintah Pusat - Tranfer Ke Daerah <ul style="list-style-type: none">• DBH• DAU• DAK• Dana Otonomi Khusus;• Dana Keistimewaan;• Dana Desa.• Insentif Fiskal Daerah;				Belanja Modal	
						Belanja Tidak Terduga	
						Belanja Transfer	<ul style="list-style-type: none">• Bagi Hasil• Bantuan Keuangan
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah						
					PEMBIAYAAN DAERAH	Penerimaan Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">• Silpa• Pencairan Dana Cadangan• Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan• Penerimaan Kembali atas Pemberian Pinjaman• Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah• Penarikan Dana Abadi Daerah• Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
						Pengeluaran Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">• Pembayaran Cicilan Pokok Pembiayaan Utang Yang Jatuh Tempo;• Penyertaan Modal Daerah;• Pembentukan Dana Cadangan;• Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau• Pembentukan Dana Abadi Daerah• Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



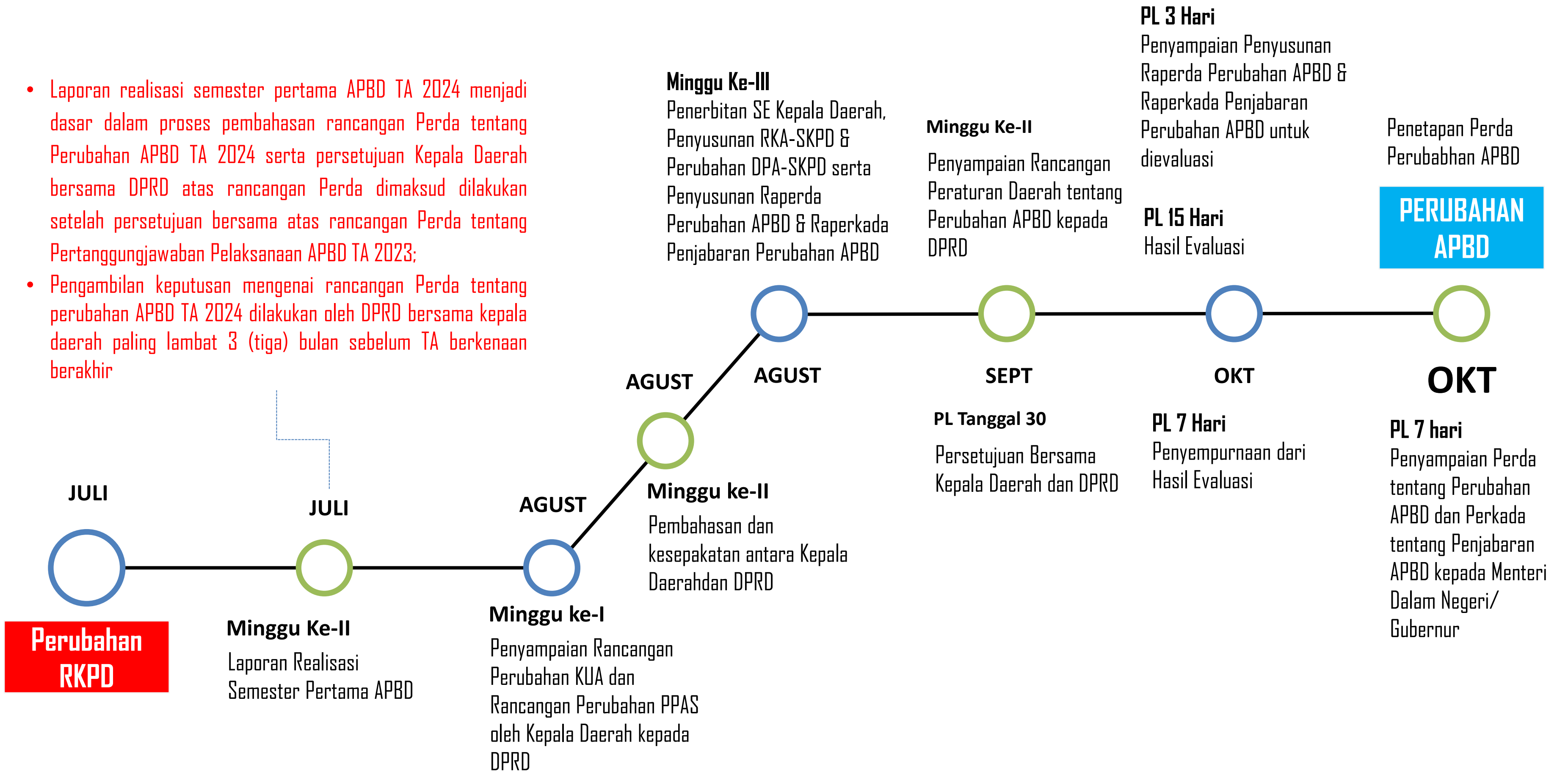




TAHAPAN	SUDAH	BELUM
RKPD	457	89
Penetapan KUA-PPAS	136	410
RAPBD	0	546
APBD	0	546

*data per Tanggal 19 Agustus 2024

- Laporan realisasi semester pertama APBD TA 2024 menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 serta persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023;
- Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD TA 2024 dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum TA berkenaan berakhir





BELANJA DAERAH



Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, Bidang Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang **diuraikan ke dalam Akun, kelompok, Jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian objek Belanja Daerah.**

BERPEDOMAN PADA

Standar Satuan
Harga Regional

Analisis Standar
Belanja

DITJEN BINA BANGDA

Menyiapkan dan menyusun **KODE REKENING** dan **NOMENKLATUR** untuk **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Makan Bergizi**

DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH

Menyiapkan dan menyusun **KODE REKENING** dan **NOMENKLATUR** untuk **Sub Rincian Objek Belanja Makan Bergizi**

Dituangkan dalam **Pemutakhiran** atas
Kepmendagri 050-5889
Tahun 2021 sebagaimana
diubah dengan
**Kepmendagri
900.1.15.5-1317 Tahun
2023**



PENGAWASAN

Mekanisme pengawasan dilakukan **secara berjenjang** mulai dari Tingkat Lingkungan Sekolah sampai dengan Tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengawasan yang dilakukan dari Tingkat Sekolah **dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah** dengan melibatkan SKPD terkait

Mekanisme pengawasan atas pelaksanaan Program Makan Bergizi di **Sekolah** dapat dilakukan dengan melibatkan pihak:

1.



KOMITE SEKOLAH

2.



CAMAT

3.



POLSEK

4.

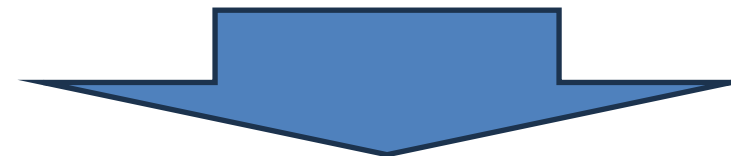


KORAMIL

5.



PUSKESMAS



Mekanisme pengawasan atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Tingkat **Kabupaten/Kota** dilakukan dengan melibatkan pihak:



Kabupaten



Kota



INSPEKTORAT DAERAH



HAL-HAL YANG PERLU DIDISKUSIKAN TERKAIT IMPLEMENTASI MAKAN BERGIZI GRATIS

1. Memastikan lokasi lahan sentra pelayanan makan bergizi gratis telah menjadi aset pemerintah daerah (tercatat dalam BMD).
2. Memastikan standar spesifikasi teknis (bangunan, peralatan dan sumber daya manusia) sentra pelayanan makan bergizi gratis telah tersedia untuk menjadi pedoman bagi masing-masing pemerintah daerah.
3. Memastikan ketersediaan pasokan bahan baku dan potensi kerjasama antar pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan makan bergizi gratis.
4. Memastikan timeframe implementasi kebijakan pada masing-masing pemerintah daerah disesuaikan dengan siklus pengelolaan keuangan daerah.
5. Memastikan adanya panduan pola pengelolaan (SOP perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta Pelaporan) implementasi makan bergizi gratis yang bersumber dari APBD.



SARAN DAN TINDAKLANJUT



1. **Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan makan bergizi gratis yang bersumber dari APBD** guna menyamakan persepsi pemerintah daerah dan memastikan efektivitas penggunaan APBD dalam pelaksanaan kebijakan.
2. **Analisis kebutuhan dana** dan manfaat ekonomi (manfaat tambahan akibat adanya persebaran belanja kebutuhan makan bergizi gratis) di masing-masing daerah.
3. **Menyiapkan payung hukum** atas pelaksanaan program makan bergizi guna menjaga akuntabilitas dan tata kelola mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporannya.
4. **Melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah** guna melakukan langkah-langkah penyesuaian APBD untuk penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan atas implementasi pemberian Makan Bergizi yang dituangkan dalam peraturan kepala daerah sebagai pedoman pelaksanaan di daerah
5. **Menyusun komunikasi publik (*Branding*) dan membangun aplikasi digital** yang dapat diakses oleh publik atas pelaksanaan program pemberian makan bergizi dan juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengawasan.



1. Penyediaan program makan bergizi dapat disiapkan di dalam lingkungan sekolah dasar melalui program padat karya (dengan melibatkan peran orang tua, kantin sekolah atau UMKM di sekitar sekolah) sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efektif dan efisien.
2. Pemerintah desa dapat melibatkan peran BUMDesa dalam penyediaan bahan baku pangan.
3. Menyederhanakan Tata Kelola (*governance*) atas pengelolaan keuangan dan pengawasan terkait dengan program pemberian makan bergizi, sehingga pihak sekolah tidak disibukkan dengan dokumen pertanggungjawaban (mengurus dokumen SPJ Administratif) dengan tetap menjaga akuntabilitas.



Jakarta, 04 September 2024

